

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sagala (2009: 271), pendidikan merupakan suatu proses manajerial dan institusional pembelajaran. Struktural kependidikan disusun menurut pola tertentu menjadi bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional untuk mencapai tujuan. Keberhasilan pendidikan tercermin pada kualitas pembelajaran dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Peserta didik akan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mengatasi kesulitan belajar sebagai akibat dari proses belajar yang dibimbing oleh guru dan tenaga kependidikan sekolah lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan bahwa, “Tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”. Pengertian ini masih bersifat umum, mencakup pengertian penyelenggaraan pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Menurut Yahya (2013: 18), tenaga kependidikan dalam konteks sistem pendidikan nasional yang dimaksud adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada satuan pendidikan seperti pendidik, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, peneliti dan tenaga teknis administrasi penyelenggara pendidikan.

Komponen tenaga kependidikan mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Salah satu komponen terpenting tenaga kependidikan disekolah adalah kepala sekolah dan pendidik (guru). Kepala sekolah merupakan seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan struktur

(kepala sekolah) di sekolah. Sebagai pejabat struktur, kepala sekolah memiliki kedudukan, fungsi dan tugas yang penting dalam pengelolaan satuan pendidikan. karena penanggung jawab pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya tanggungjawab pelaksanaan administrasi sekolah, kepala sekolah juga bertugas sebagai pemimpin pelaksana administrasi pada tingkat satuan pendidikan.

Khan dan Shaheen (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “*The Leadership Role of Secondary School Principals and Its Impact on Students’ Academic Achievement*” menjelaskan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pencapaian akademik siswa di sekolah menengah di Karachi dengan gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh pada prestasi akademik siswa dan juga meningkatkan tingkat kinerja para guru. Kepala sekolah menengah swasta lebih peduli tentang pencapaian akademik siswa. mereka sangat menekankan nilai dan persentase siswa dalam ujian dewan yang memastikan lebih banyak pendaftaran di sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, mereka memberdayakan para guru untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan, seperti merancang kurikulum, silabus dan mengatur acara akademis lainnya.

Menurut Yahya (2013: 81), peran dan kedudukan kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita dan keberhasilan peserta didik. Kepala sekolah juga berperan menggerakkan dan mengelola tenaga kependidikan untuk secara bersama-sama mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di tingkat sekolah atau madrasah. Kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam upaya peningkatan atau pengembangan kompetensi guru dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Kepala sekolah harus mempersiapkan berbagai upaya agar kompetensi yang dimiliki guru dapat berkembang demi tercapainya tujuan dari pendidikan.

Menurut Saputra (2017: iii), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dirancang untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila

sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas yang berkaitan dengan sejumlah tema kewarganegaraan. Peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan peduli terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat disekitarnya. Peserta didik dapat menunjukkan kepeduliannya melalui partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan tidak hanya sebatas kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan pada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang mampu dilakukan oleh tiap peserta didik. Dengan demikian akan terbentuk sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Menurut Sagala (2009: 6), guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling sering bergaul dan berinteraksi dengan peserta didik dibandingkan komponen lainnya disekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa, “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional” agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah kompetensi. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 dinyatakan bahwa, “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Menurut Hasanah (2012: 41), kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal, yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Navarro, Zervas, Gesa dan Sampon (2016), dalam penelitian yang berjudul *“Developing Teachers’ Competences for Designing Inclusive Learning Experiences”* menjelaskan bahwa dalam lingkup pendidikan inklusif, guru diakui sebagai pemain kunci dalam mendukung proses menuju sistem pendidikan inklusif. Akibatnya, guru harus dilengkapi dengan kompetensi yang sesuai untuk menangani beragam kebutuhan dan preferensi siswa mereka dan memberi mereka kesempatan pendidikan yang setara. Penelitian ini menjelaskan desain, implementasi dan evaluasi guru PDP untuk mendukung guru dalam proses merancang pengalaman belajar inklusif untuk siswa mereka. Desain guru PDP didasarkan pada penerapan prinsip UDL untuk merancang OERs inklusif. Selain itu, guru PDP sejajar untuk mendukung kompetensi seperti yang diusulkan oleh CFIT. Hasil evaluasi dari guru PDP menunjukkan bahwa peserta menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar antara pre-test dan post-test ketika merancang rencana pelajaran yang inklusif. Akhirnya, nilai peserta untuk kegiatan penilaian PDP guru cukup tinggi dan dalam tingkat kinerja yang sangat baik.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Berdasarkan kompetensi guru yang telah disebutkan, kompetensi yang sangat berpengaruh pada saat proses pembelajaran yaitu kompetensi paedagogik. Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Suyanto dan Djihad, 2012: 49).

Suarmika (2018), dalam penelitian yang berjudul *“Teacher Paedagogic Competency and National Examination Result at Elementary School”* menjelaskan bahwa pendidikan sains perlu menerapkan kegiatan kelas yang inovatif, seperti aktivitas penelitian dan pemecahan masalah nyata, yang memungkinkan siswa untuk memobilisasi dan mengintegrasikan berbagai kompetensi untuk membangun penjelasan atau argumen yang koheren, terkait dengan masalah sosio-ilmiah kehidupan sehari-hari. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang baik dalam

pembelajaran sains. Kompetensi pedagogis terutama berkaitan dengan tingkat pemahaman peserta didik, desain instruksional, dan pelaksanaan pembelajaran diagnosis, evaluasi pembelajaran, perkembangan peserta didik telah memberikan dukungan yang signifikan dalam bentuk pengajaran pedagogis profesional. Selain peran guru ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar sains antara lain: motivasi, minat, pengetahuan awal siswa tentang sains, lingkungan dan faktor orang tua.

Menjadi guru kompeten bukan sesuatu yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya sungguh-sungguh dan komperhensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui optimalisasi peran kepala sekolah. Menurut Anwar dan Amir sebagaimana dikutip oleh Daryanto (2011: 30), menyebutkan bahwa, “Kepala sekolah sebagai pengelola memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan kompetensi profesional guru”. Kompetensi profesional tersebut tidak hanya terkait dengan penguasaan materi saja, tetapi mencakup seluruh jenis dan isi kandungan kompetensi guru. Tujuh peran utama kepala sekolah dalam prespektif pendidikan nasional yaitu, sebagai *educator* (pendidik), *manajer*, *administrator*, *supervisor* (penyedia), *leader* (pemimpin), pencipta iklim kerja, dan wirausahawan. Jika kepala sekolah dapat menjalankan peran-peran diatas maka dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi guru yang akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan.

Erat hubungannya antara kompetensi paedagogik dengan seorang calon guru Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Keterkaitan tersebut tertuang dalam visi Program Studi PPKn yaitu, “Tahun 2029 menjadi program studi unggulan yang memberi arah perubahan pada pengembangan pendidikan dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang profesional dan berkepribadian islami”. Selaras dengan visi dari Program Studi PPKn jelas terlihat bahwa pengembangan pendidikan dan pembelajaran PPKn yang profesional merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi untuk dikembangkan dan dilaksanakan baik oleh dosen, mahasiswa maupun lulusannya. Keprofesionalan yang dikembangkan mencakup empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru

yaitu, kompetensi profesional, paedagogik, sosial dan kepribadian. Berdasarkan pernyataan diatas maka sangat erat kaitannya antara Program Studi PPKn dengan pengembangan kompetensi keprofesionalan guru termasuk kompetensi paedagogik guru PPKn.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikehataui peran kepala sekolah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi guru. Cakupan kompetensi guru tersebut masih sangat luas, oleh karena itu peneliti mengkhususkan menjadi kompetensi paedagogik pada guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Paedagogik Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada pada penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018?
2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.
2. Mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.
3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pemahaman tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - b. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi guru, sebagai masukan dan pertimbangan untuk mengembangkan kompetensi paedagogik guru.
 - b. Manfaat bagi sekolah, memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan program pengembangan kompetensi guru khususnya kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di masa yang akan datang.
 - c. Manfaat bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi paedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.